



TAHUN 2025

RENCANA KERJA (RENJA)



DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PRABUMULIH
Tahun Anggaran 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas izin-Nya Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Prabumulih dapat menyelesaikan Laporan RENJA Tahun 2025.

Renja Tahun 2025 ini berisi Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, realisasi anggaran Program/Kegiatan tahun sebelumnya (2023). Renja Tahun 2025 merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab di dalam proses pembangunan Ketahanan Pangan di Kota Prabumulih. Penyusunan Renja Tahun 2025 bertujuan merumuskan kebijakan terhadap Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif serta tepat sasaran mengacu kepada RENSTRA 2024-2026.

Kami menyadari Laporan RENJA Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna oleh karena masukan dan saran senantiasa kami harap untuk perbaikan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan RENJA Tahun 2025 yang akan datang.

Prabumulih, 31 Januari 2024

Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Kota Prabumulih,



Suranti, SP

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19640325 198708 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
A. Maksud	6
B. Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah.	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA DKP Kota dan Capaian RENSTRA DKP.....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DKP	35
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	43
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	44
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	44
3.1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	44
3.1.2 Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi	44
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih.....	46
3.3 Program dan Kegiatan.....	40
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	61
Bab V Penutup	63

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Langsung Tahun 2023	9
Tabel 2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program RENJA DKP Tahun 2023.....	17
Tabel 2.3 Pencapaian Kineja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih	34
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Prabumulih	43
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2024-2026 Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih	48
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Prabumulih.....	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RENJA	3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Prabumulih Tahun 2024-2026. Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki, maka disusunlah Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan untuk periode satu tahun baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan 2024-2026, yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran Program dan Kegiatan. Penyusunan rencana kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi PD untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Renja PD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan.

Kebijakan umum pemerintah Kota Prabumulih dalam pembangunan ketahanan pangan adalah untuk mengatasi tantangan dan

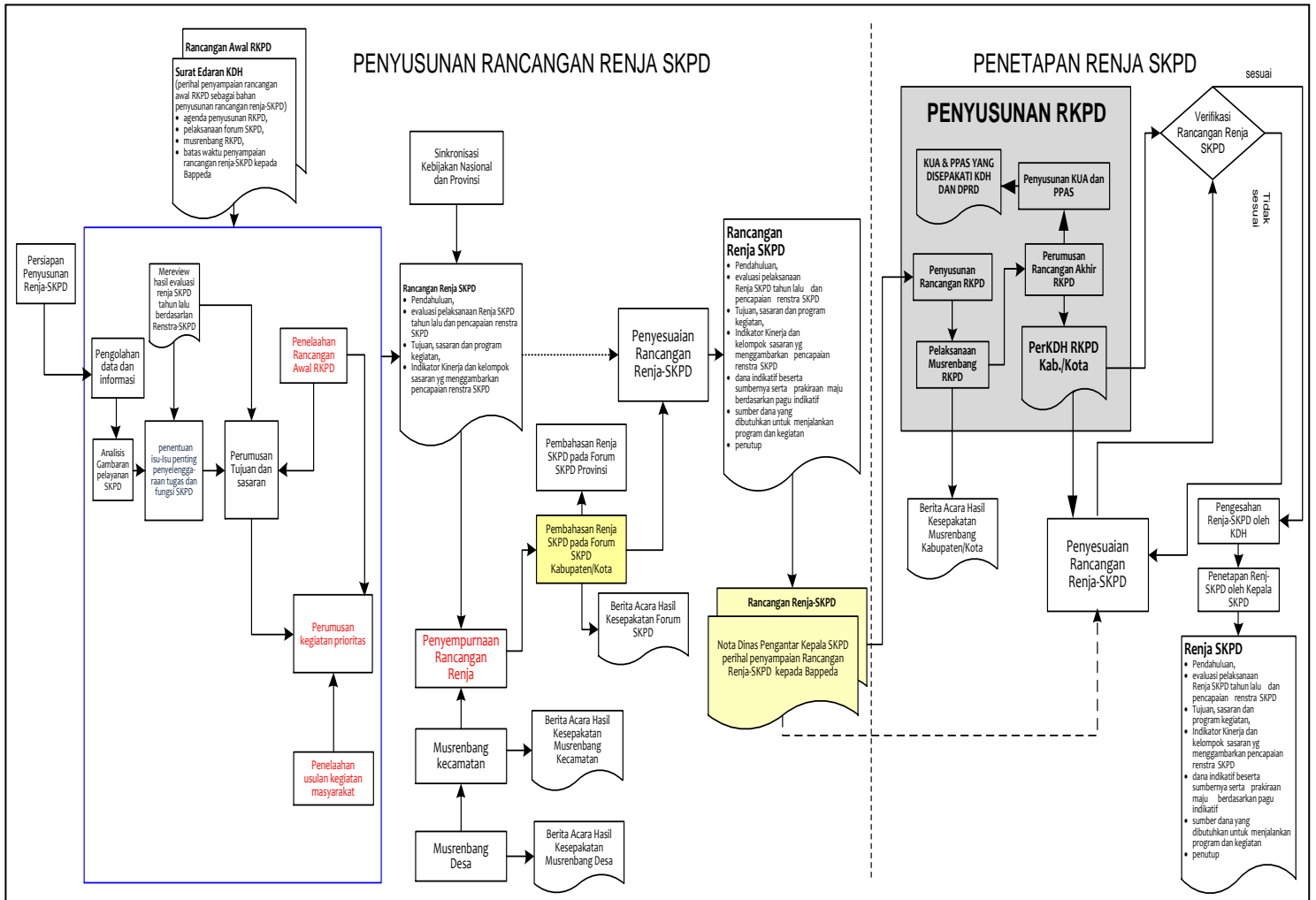
masalah yang menghambat proses dan kinerja sub sistem ketahanan pangan serta mendayagunakan peluang yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi kecukupan pangan bagi setiap penduduk. Kebijakan tersebut disusun melalui proses identifikasi isu-isu penting dalam kerangka pembangunan ketahanan pangan dan kecukupan gizi, dilanjutkan dengan perumusan kebijakan untuk menindaklanjuti, mengantisipasi atau mengatasi isu-isu dimaksud. Kebijakan ini dikelompokkan dalam kebijakan jangka pendek dan kebijakan jangka menengah.

Kebijakan jangka pendek diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani kerawanan pangan *transient* (mendadak) serta kronis. Dalam hal kerawanan *transient*, kebijakan diarahkan untuk mengatasi situasi yang bersifat darurat sedangkan dalam hal kerawanan kronis, kebijakan diarahkan untuk memberikan bantuan dan meningkatkan kemampuan serta kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah ketahanan pangannya.

Kebijakan jangka menengah diarahkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam penyediaan cadangan pangan, peningkatan distribusi dan stabilitas pasokan dan harga pangan, pola konsumsi dan keamanan pangan segar bagi seluruh penduduknya secara berkelanjutan. Disamping itu, untuk mengantisipasi pemenuhan kebutuhan pangan yang terus meningkat, kebijakan jangka menengah juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi tanaman pekarangan, mendorong proses penganeekaragaman pangan serta meningkatkan jaminan bagi setiap penduduk untuk memperoleh pangan yang cukup.

Dalam penyusunan Renja PD, dibutuhkan keselarasan program/kegiatan yang tertuang dalam dokumen perencanaan yaitu: RPD Kota Prabumulih 2024-2026, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja PD adalah sebagaimana tercantum dalam gambar 1. berikut ini:

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih tahun 2024 :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4285);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3 ;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Menteri Pertanian No: 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kab/Kota;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pembangunan daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2012, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Perda Kota Prabumulih No. 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 9).

1.3. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2024 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2024, yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam proses pembangunan Ketahanan Pangan di Kota Prabumulih yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan sehingga tercapai tujuan yang diharapkan.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih adalah:

- a. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun Perencanaan Strategis (renstra) dalam 3 tahun (RPD) dan Rencana Kerja (Renja) setiap satu tahun sekali.
- b. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota Prabumulih.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar belakang penyusunan RENJA, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan RENJA dan sistematika penulisan dokumen RENJA.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Memuat pelaksanaan RENJA PD tahun lalu dan capaian RENSTRA PD. analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisi telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran RENJA PD, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan rencana kerja perangkat daerah dan sumber pendanaan

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Prabumulih tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Ketahanan pangan Kota Prabumulih dalam melaksanakan program dan kegiatannya tahun lalu, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan RENSTRA DKP Kota Prabumulih, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA DKP Kota dan Capaian RENSTRA DKP

Evaluasi pelaksanaan RENJA DKP Kota Prabumulih tahun lalu dan pencapaian kinerja RENSTRA Kota Prabumulih ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu (Tahun 2023) yang dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA DKP Kota Prabumulih berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Adapun program dan kegiatan APBD Tahun 2023 yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada Tahun 2023 adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Realisasi Fisik Dan Keuangan Belanja Langsung Tahun 2023

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Realisasi (Rp)	Persentase				
			Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)						
2												
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	09											
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN												
2	09	01										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.459.579.780	-	3.591.320.099	3.242.700.492	90,29%			
2	09	01	2.01									
Perencanaan, Penganggran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					13.200.000	-	13.200.000	12.655.500	95,88%			
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.300.000	1 Dokumen	1.300.000	1.158.000	89,08%
2	09	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.300.000	1 Dokumen	1.300.000	1.175.500	90,42%
2	09	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.300.000	1 Dokumen	1.300.000	1.197.000	92,08%
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1.300.000	1 Dokumen	1.300.000	1.125.000	86,54%
2	09	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Maturitas SPIP	1 Dokumen	4.050.000	1 Dokumen	4.050.000	4.050.000	100,00%
						Tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi	1 Dokumen	3.950.000	1 Dokumen	3.950.000	3.950.000	100,00%
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.887.926.780		2.893.362.099	2.591.888.121	89,58%

Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Realisasi (Rp)	Persentase
							Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)		
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Pegawai	47 Orang/Bulan	2.850.526.780	47 Orang/Bulan	2.855.962.099	2.554.874.371	89,46%
2	09	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	34.800.000	1 Dokumen	34.800.000	34.800.000	100,00%
2	09	01	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.300.000	1 Dokumen	1.300.000	1.086.500	83,58%
2	09	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	1.300.000	1 Dokumen	1.300.000	1.127.250	86,71%
2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			13.200.000		7.200.000	7.200.000	100,00%
2	09	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	13.200.000	1 Laporan	7.200.000	7.200.000	100,00%
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			23.000.000		23.000.000	21.030.000	91,43%
2	09	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30 Paket	23.000.000	30 Paket	23.000.000	21.030.000	91,43%
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			367.053.000		507.238.000	483.969.683	95,41%
2	09	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.083.000	1 Paket	4.083.000	3.362.000	82,34%

Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Realisasi (Rp)	Persentase
							Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)		
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	17.970.000	2 Paket	13.160.000	10.445.000	79,37%
						Rincian						
						Tersedianya air minum galon untuk kebutuhan kantor	1 Paket	5.460.000	1 Paket	5.460.000	7.750.000	
						Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	1 Paket	12.510.000	1 Paket	7.700.000	2.695.000	
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	1 paket	12.745.000	8.561.750	67,18%
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	7.250.000	6.900.000	95,17%
2	09	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	12.076.500	60,38%
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	450.000.000	442.624.433	98,36%
						Rincian						
						Tersedianya Anggaran Untuk Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	400 OH	270.000.000	663 OH	390.000.000	388.614.433	99,64%
						Tersedianya Anggaran Untuk Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	200 OH	30.000.000	200 OH	60.000.000	54.010.000	90,02%
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			63.000.000		28.000.000	26.246.365	93,74%
2	09	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	28.000.000	3 unit	28.000.000	26.246.365	93,74%

Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Realisasi (Rp)	Persentase
							Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)		
2	09	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	35.000.000	-	-	-	-
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.200.000		2.200.000	2.200.000	100,00%
2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.200.000	1 Laporan	2.200.000	2.200.000	100,00%
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			90.000.000		117.120.000	97.510.823	83,26%
2	09	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	80.000.000	18 Unit	110.000.000	95.840.823	87,13%
2	09	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10.000.000	10 unit	7.120.000	1.670.000	23,46%
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			775.000.000		1.113.000.000	886.651.353	79,66%
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			215.000.000		403.000.000	319.502.900	79,28%
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2 Laporan	30.000.000	2 Laporan	30.000.000	28.255.200	94,18%
						Rincian:						
						Jumlah Media untuk mengekspos Data Informasi Harga Pangan Ke Sektor Publik	1 Media	10.000.000	1 Media	10.000.000	8.319.200	83,19%

Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Realisasi (Rp)	Persentase
							Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)		
						Jumlah Laporan NBM PPH Kota Prabumulih	1 Dokumen	20.000.000	1 Media	20.000.000	19.936.000	99,68%
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	48.878.000	97,76%
2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	9.854.000	98,54%
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	3 Dokumen	40.000.000	3 Dokumen	40.000.000	35.076.000	87,69%
						Rincian:						
						Jumlah Laporan Harga Pangan Pokok 16 Komoditi	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	4.955.000	99,10%
						Jumlah Laporan Stok/Pasokan Pangan Kota Prabumulih	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	9.084.000	90,84%
						Terpantaunya Ketersediaan Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan Pokok (Satgas Pangan)	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	21.037.000	84,15%
2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	1 unit	85.000.000	1 Unit	85.000.000	40.310.700	47,42%
2	09	03	2.01	7	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-	-	150 KK	188.000.000	157.129.000	83,58%
						Rincian:						
						Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga melalui Pemberdayaan Pekarangan dengan Tanaman Obat Keluarga	-	-	75 KK	92.000.000	71.399.000	77,61%

Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Realisasi (Rp)	Persentase
							Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)		
						Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga melalui Pembinaan kepada Sumberdaya Keluarga	-	-	75 KK	96.000.000	85.730.000	89,30%
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			150.000.000		150.000.000	86.313.858	57,54%
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Ton Cadangan Pangan Pemerintah	8,2 ton	150.000.000	8,2 ton	140.000.000	78.540.702	56,10%
2	09	03	2.02	04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota yang terpelihara		-		10.000.000	7.773.156	77,73%
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			410.000.000		560.000.000	480.834.595	85,86%
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita Per tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	23.131.000	92,52%
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4 Laporan	385.000.000	5 Laporan	535.000.000	457.703.595	85,55%
						Rincian:						
						Jumlah Kelompok yang mengikuti kegiatan Pemeliharaan Obor Pangan Lestari	2 Kelompok	20.000.000	3 Kelompok	95.000.000	118.482.345	124,72%

Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Realisasi (Rp)	Persentase
							Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)		
						Jumlah Tim yang diikutsertakan untuk terlaksananya kegiatan Penilaian Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman	6 Tim	50.000.000	6 Tim	50.000.000	48.816.625	97,63%
						Jumlah Kelompok yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat melalui Pembinaan Kelompok Pangan Olahan UP2K	10 Kelompok	240.000.000	10 Kelompok	240.000.000	226.563.000	94,40%
						Jumlah Kelompok yang diikutsertakan untuk Penilaian Lomba Kelompok Pangan Olahan UP2K	6 Kelompok UP2K	75.000.000	6 Kelompok UP2K	75.000.000	63.841.625	85,12%
						Pemberdayaan Masyarakat melalui Promosi dan Edukasi Produk Pangan Lokal melalui Pameran Kegiatan EXPO GSMP	-	-	1 Kegiatan	75.000.000	-	0,00%
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			20.000.000		20.000.000	19.684.000	98,42%
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			20.000.000		20.000.000	19.684.000	98,42%
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	19.684.000	98,42%
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			30.000.000		30.000.000	29.675.000	98,92%
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			30.000.000		30.000.000	29.675.000	98,92%

Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Realisasi (Rp)	Persentase
							Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)		
2	09	05	2.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	9.925.000	99,25%
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	19.750.000	98,75%
TOTAL								4.284.579.780	-	4.754.320.099	4.178.710.845	87,89%

Tabel 2.2

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program RENJA DKP Tahun 2023

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN DESEMBER		REALISASI SD. BULAN DESEMBER		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
0,089710648	DINAS KETAHANAN PANGAN								93,43	
2.9 2.9.11 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran				100,00		95,00	95	
2.9 2.9.11 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang tepat waktu				100		100	100	
2.9 2.9.11 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	1	100	1	100	100	
2.9 2.9.11 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	100	1	100	100	
2.9 2.9.11 1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	100	1	100	100	
2.9 2.9.11 1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	1	100	1	100	100	
2.9 2.9.11 1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	2	100	2	100	100	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN DESEMBER		REALISASI SD. BULAN DESEMBER		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.9 2.9.11 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100		100	100	
2.9 2.9.11 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Pegawai	35	Orang/Bulan	35	100	35	100	100	
2.9 2.9.11 1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	1	100	1	100	100	
2.9 2.9.11 1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	100	1	100	100	
2.9 2.9.11 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1	Laporan	1	100	1	100	100	
2.9 2.9.11 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen BMD yang Disampaikan Tepat Waktu				100		100	100	
2.9 2.9.11 1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	100	1	100	100	
2.9 2.9.11 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terpenuhi				100		90	90	
2.9 2.9.11 1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30	Paket	30	100	27	90	90	
2.9 2.9.11 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi umum Perkantoran				100		100	100	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN DESEMBER		REALISASI SD. BULAN DESEMBER		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.9 2.9.11 1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	1	100	1	100	100	
2.9 2.9.11 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	2	100	2	100	100	
2.9 2.9.11 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	1	100	1	100	100	
2.9 2.9.11 1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	1	100	1	100	100	
2.9 2.9.11 1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	1	100	1	100	100	
2.9 2.9.11 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	1	100	1	100	100	
2.9 2.9.11 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100		50	50	
2.9 2.9.11 1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Unit	3	100	3	100	100	
2.9 2.9.11 1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1	100	0	0	0	Kegiatan tidak dapat direalisasikan dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi
2.9 2.9.11 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100		100	100	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN DESEMBER		REALISASI SD. BULAN DESEMBER		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.9 2.9.11 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1	100	1	100	100	
2.9 2.9.11 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan BMD				100		100	100	
2.9 2.9.11 1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19	Unit	19	100	19	100	100	
2.9 2.9.11 1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	10	100	10	100	100	
2.9 2.9.11 3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kinerja Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat				100,00		88,00	88	
2.9 2.9.11 3 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kab/Kota				100		100	100	
2.9 2.9.11 3.2.01.1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2	Laporan	2	100	2	100	100	
2.9 2.9.11 3.2.01.2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1	Laporan	1	100	1	100	100	
2.9 2.9.11 3.2.01.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1	Laporan	1	100	1	100	100	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN DESEMBER		REALISASI SD. BULAN DESEMBER		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.9 2.9.11 3.2.01.4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	3	Dokumen	3	100	3	100	100	
2.9 2.9.11 3.2.01.5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	1	Unit	1	100	1	100	100	
2.9 2.9.11 3.2.01.07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	150	Keluarga	150	100	150	100	100	
2.9 2.9.11 3 2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				100		50	50	
2.9 2.9.11 3.2.02.3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Ton Cadangan Pangan Pemerintah	9	Ton	9	100	0	0	0	Kegiatan pengadaan cadangan pangan tidak direalisasikan dikarenakan ada kegiatan penyaluran cadangan pangan yang terdapat pada APBD Perubahan Tahun 2023 serta proses pencairannya berada pada pertengahan bulan November dimana menurut surat dari BULOG Kanwil Sumsel Babel tidak dapat melakukan pengadaan sebelum dilakukan penyaluran beras yang telah disimpan/dititipkan di BULOG.

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN DESEMBER		REALISASI SD. BULAN DESEMBER		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
										Sementara, penyaluran beras tersebut dilaksanakan pada awal bulan Desember tahun 2023, sehingga waktu yang diperlukan untuk melakukan proses pengadaan cadangan pangan tidak mencukupi waktu dikarenakan telah mencapai batas waktu akhir anggaran tahun 2023.
2.9 2.9.11 3.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	9	Ton	9	100	9	100	100	
2.9 2.9.11 3 2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Meningkatnya Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				100		90	90	
2.9 2.9.11 3.2.04.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1	Dokumen	1	100	1	100	100	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN DESEMBER		REALISASI SD. BULAN DESEMBER		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.9 2.9.11 3.2.04.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	5	Laporan	5	100	4	80	80	Kegiatan Promosi dan Edukasi Produk Pangan Lokal melalui Pameran Kegiatan EXPO Gerakan Sumsel Mandiri Pangan tidak dapat direalisasikan dikarenakan tidak adanya undangan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel untuk melaksanakan kegiatan tersebut
2.9 2.9.11 4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya Program Penanganan Kerawanan Pangan				100,00		100,00	100	
2.9 2.9.11 4 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				100		100	100	
2.9 2.9.11 4.2.01.1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1	Dokumen	1	100	1	100	100	
2.9 2.9.11 5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya Program Pengawasan Keamanan Pangan				100,00		100,00	100	
2.9 2.9.11 5 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				100		100	100	
2.9 2.9.11 5.2.01.3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	100	1	100	100	

KODE	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	TARGET 1 TAHUN	SATUAN	TARGET SD. BULAN DESEMBER		REALISASI SD. BULAN DESEMBER		CAPAIAN	KENDALA
					VOL	%	VOL	%		
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100	8	9=8/6*100	10=8/4*100	
2.9 2.9.11 5.2.01.5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	100	1	100	100	

Pada umumnya tidak ada hambatan yang sangat berarti dalam pencapaian target dari program dan kegiatan.

Pada Tahun Anggaran 2023, ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan

Kegiatan ini tidak terlaksana dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi.

b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Kegiatan promosi dan Edukasi Produk Pangan Lokal melalui pameran kegiatan EXPO GSMP)

Kegiatan Promosi dan Edukasi Produk Pangan Lokal melalui Pameran Kegiatan EXPO Gerakan Sumsel Mandiri Pangan tidak dapat direalisasikan dikarenakan tidak adanya undangan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

c. Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Kegiatan pengadaan cadangan pangan tidak dapat direalisasikan karena kegiatan tersebut terdapat pada APBD Perubahan Tahun 2023 serta proses pencairannya berada pada pertengahan bulan November dimana menurut surat dari BULOG Kanwil Sumsel Babel tidak dapat melakukan pengadaan sebelum dilakukan penyaluran beras yang telah disimpan/dititipkan di BULOG. Sementara, penyaluran beras tersebut dilaksanakan pada awal bulan Desember tahun 2023, sehingga waktu yang diperlukan untuk melakukan proses pengadaan cadangan pangan tidak mencukupi waktu dikarenakan telah mencapai batas waktu akhir anggaran tahun 2023.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan yaitu :

1. Meningkatkan Ketersediaan Pangan yang cukup
2. Meningkatkan Skor/Angka Konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi seimbang dan Aman (B2SA).
3. Tersedianya Informasi Stabilisasi Harga dan Pasokan (Stok) Pangan secara konsisten dan *continyu*
4. Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Namun untuk mencapai peningkatan dalam target kinerja dalam rangka mendukung visi, misi Pemerintah Daerah, perlu beberapa kebijakan / tindakan dalam perencanaan anggaran tahun depan (Mengacu Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah) antara lain :

1. Melaksanakan kegiatan peningkatan ketahanan pangan secara berkesinambungan terkait aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.
2. Melaksanakan Program dan Kegiatan yang menjadi perhatian di Bidang Ketahanan Pangan yaitu
 - Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
 - Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - Program Pengawasan Keamanan Pangan
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih berisikan capaian kinerja pelayanan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci sebagai berikut :

1. Ketersediaan Pangan Utama serta Ketersediaan Energi dan Protein perkapita (PPH Ketersediaan)

Ketersediaan Pangan yaitu kondisi tersedianya pangan utama untuk memenuhi kebutuhan penduduk suatu wilayah. Aspek penyusun ketersediaan pangan utama suatu daerah yaitu Produksi, Pasokan dari Cadangan Pangan yang dimiliki.

a. Energi

Dari sisi energi banyaknya kalori yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk Prabumulih tahun 2023 adalah sebesar 2.508,98 kkal/kap/hr, sedikit menurun dari tahun sebelumnya yang baru mencapai 13.845,34 kkal/kap/hr. Secara umum kondisi ini sudah diatas standar ideal nasional sesuai dengan rekomendasi yang telah ditetapkan Widyaswara Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X tahun 2012 yakni sebesar 2400 kkal/kap/hr. Dari total energi tersebut sebanyak 1.625,47 kkal/kap/hr disumbang dari sumber energi nabati, sedangkan dari energi dari sumber hewani sebesar 1.122,53 kkal/kap/hr. Tabel diatas juga memberikan gambaran bahwa kontribusi ketersediaan energi di tahun 2023 paling banyak disokong oleh Kelompok Padi-padian yang dalam hal ini terdiri dari beras, jagung ,dan gandum yakni sebesar 46,44 %. Disusul oleh Kelompok minyak dan Lemak (19,71 %), Kelompok Daging (termasuk jeroan) sebesar (18,22%), Kelompok sayur-sayuran (5,25%), Kelompok Ikan (5,52%), Kelompok Umbi-umbian (3,92 %), Kelompok Buah/ Biji Berminyak (3,72 %), Kelompok Gula (3,38%), kelompok Buah-buahan (2,07%), Kelompok Telur (1,29 %), dan Kelompok susu (0,36 %).

b. Protein

Total protein yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk Prabumulih Tahun 2023 adalah sebesar 125,43 g/kap/hr dan mengalami Peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 76,5 g/kap/hr. Angka ini sudah di atas standar ideal yang ditetapkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2012 yang merekomendasikan ketersediaan protein sebesar 63/kap/hr. Dari total protein tersebut sebanyak 47,14 g/kap/hr berasal dari protein nabati, sedangkan protein hewani sebesar 78,31 g/kap/hr. Kontribusi protein terbesar diperoleh dari kelompok daging (termasuk jeroan) 51,30, g/hr atau 40,89%, disusul oleh Kelompok Padi-padian yang menyumbang sebesar 29,21 g/hari atau 23,29 % dari total protein keseluruhan, Kelompok ikan 23,92 gr/hr (19,07 %), Kelompo Sayur-sayuran 8,35 gr/hr (6,66 %), Kelompok Buah/Biji Berminyak 8,27 gr/hr (6,59), Kelompok Telur 2,60 gr/hr (2,07 %), Kelompok Umbi-umbian 0,62 gr/hr (0,49 %)Kelompok susu 0,38 gr/hr (0,48 %), , Kelompok gula 0,01 gr/hr (0,01 %)Kelompok Minyak dan Lemak 0,01 gr/hr 0,01 %).

c. Lemak

Total lemak yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk Prabumulih tahun 2023 adalah sebesar 71,22 g/kap/hr yang mana mengalami sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 45,70 g/kap/hr. Dari total ketersediaan lemak tersebut, sebanyak 11,81 g/kap/hr berasal dari lemak nabati dan lemak hewani sebesar 59,42 gr/kap/hr. Kontribusi lemak terbesar berasal dari Kelompok Minyak dan Lemak yakni sebesar 27,30 g/kap/hr (38,33%), disusul Kelompok Daging (termasuk jeroan) sebesar 25,72 g/kap/hr (36,11 %), Kelompok Buah/Biji berminyak sebesar 4,91 g/kap/hr (6,89%), Kelompok Ikan 3,59 g/kap/hr (5,04 %), Kelompok Padi padian sebesar 4,33 g/kap/hr (6,08 %), Kelompok Telur sebesar 2,29 gr/kap/hr (3,22 %), Kelompok Susu sebesar 0,52 g/kap/hr (0,73 %), Kelompok Buah-buahan sebesar 0,27 gr/kap/hr (0,37 %),

Kelompok umbi-umbian sebesar 0,20 gr/kap/hr (0,28 %), kelompok sayur-sayuran sebesar 2,08 gr/kap/hr (2,92 %) dan kelompok gula sebesar 0,02 gr/kap/hr (0,03 %) dari total keseluruhan.

Ketersediaan di Kota Prabumulih Tahun 2023 berdasarkan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) adalah sebesar **94,03** yang mana mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni 94,80. Perhitungan skor ini menggunakan aplikasi baru berdasarkan konsumsi SUSENAS dan produksi pertanian sedangkan data impor-ekspor sudah berdasarkan perhitungan aplikasi NBM Tahun 2023. Dengan menggunakan skor mutu ideal PPH ketersediaan sebesar 100 maka dapat dikatakan bahwa kualitas pangan yang tersedia di Prabumulih belum memenuhi kaidah gizi yang beragam dan seimbang yang ideal. Hal ini disebabkan kontribusi energi dari masing-masing kelompok pangan masih ada yang kurang, mendekati bahkan ada yang telah melebihi normal ideal PPH ketersediaan. Adapun kelompok pangan yang kontribusinya angka ideal PPH yang direkomendasikan yakni berasal dari kelompok pangan hewani, yaitu pangan hewani, minyak dan lemak dan dari kelompok pangan nabati yaitu sayur-sayuran, sedangkan kelompok bahan pangan yang masih dibawah angka ideal yang direkomendasikan terdiri dari kelompok buah/ biji berminyak, padi-padian, kelompok umbi-umbian, kelompok gula, Kacang Kacangan dan kelompok lain-lain.

Belum tercapainya keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat di Prabumulih ditunjukkan dari konsumsi kelompok buah/ biji berminyak, padi-padian, kelompok umbi-umbian, kelompok gula, Kacang Kacangan dan kelompok lain-lain yang masih rendah. Hal ini cenderung dipengaruhi oleh :

1. Masih rendahnya daya beli masyarakat karena pendapatan yang masih rendah
2. Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pola pangan beragam bergizi seimbang dan aman.

3. Masih terbatasnya akses terhadap komoditas pangan
4. Sistem distribusi pangan yang belum efektif dan efisien
5. Produksi beberapa komoditas pangan yang masih rendah sehingga ketergantungan pasokan dari luar daerah sangat mempengaruhi harga komoditas pangan di pasaran.

Untuk meningkatkan kualitas pangan yang tersedia maka yang perlu dilakukan adalah meningkatkan keseimbangan ketersediaan energi untuk seluruh kelompok pangan melalui penambahan tingkat ketersediaan energi untuk seluruh kelompok pangan. Untuk mendukung pencapaian target skor mutu pangan tersebut, dibutuhkan ketersediaan komoditas pangan dengan jumlah dan komposisi yang memadai. Untuk dapat mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas ketersediaan pangan, perlu diketahui kemampuan produksi pangan Kota Prabumulih. Mengingat potensi Prabumulih di bidang pertanian masih cukup baik maka peningkatan produksi beberapa komoditas pangan seperti kelompok buah/biji berminyak, padi-padian, kelompok umbi-umbian, kelompok gula, Kacang Kacangan dan kelompok lain-lain perlu terus dipacu sehingga dapat mempercepat waktu pencapaian skor normal mutu pangan PPH sebesar 100.

Upaya perbaikan kualitas ketersediaan pangan ini harus ditempuh dengan pendekatan aspek-aspek sebagai berikut :

1. Penyediaan pangan diutamakan melalui peningkatan produksi dalam daerah dengan jumlah dan komposisi yang sesuai dengan kebutuhan dan kesukaan konsumen.
2. Pengembangan sistem distribusi yang efisien dengan jangkauan wilayah pedesaan dan daerah terpencil sehingga harga di pasaran dapat ditekan.
3. Penciptaan mekanisme daya beli pasar yang mendukung terbentuknya harga yang terjangkau dan mampu memberikan insentif bagi produsen untuk menghasilkan produksi pangan.

4. Keterlibatan pemerintah dan swasta dalam teknologi pengolahan pangan lokal.
5. Pemberdayaan kelompok wanita melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dan pengembangan usaha pengolahan pangan.

b. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah

Kinerja Pelayanan Indikator Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditujukan bagi pencapaian target Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Mengacu kepada Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor. 257/1869/DKPP/2018 yaitu 71,39 Ton untuk Kota Prabumulih.

Jumlah Total beras Cadangan Pangan sampai dengan saat ini yaitu sebanyak 48,669 Ton dan telah disalurkan sebanyak 36,405 Ton. Total Cadangan pangan sampai dengan tahun 2023 yang tersimpan di gudang BULOG yaitu 12,264 Ton (20,39%) dari Total Kuota Minimum Kota Prabumulih.

Kegiatan pengadaan cadangan pangan tidak direalisasikan pada tahun 2023 dikarenakan ada kegiatan penyaluran cadangan pangan yang terdapat pada APBD Perubahan Tahun 2023 serta proses pencairannya berada pada pertengahan bulan November dimana menurut surat dari BULOG Kanwil Sumsel Babel Nomor : B-160.06020.03.2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang izin prinsip penjualan beras untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) tidak dapat melakukan pengadaan sebelum dilakukan penyaluran beras yang telah disimpan/dititipkan di BULOG. Sementara, penyaluran beras tersebut dilaksanakan pada awal bulan Desember tahun 2023, sehingga waktu yang diperlukan untuk melakukan proses pengadaan cadangan pangan tidak mencukupi waktu dikarenakan telah mencapai batas waktu akhir anggaran tahun 2023.

c. Ketersediaan Informasi, Stabilitas Harga dan Pasokan (Stok) Pangan Harga dan Akses Pangan Daerah

Indikator ini menyediakan data dan informasi mencakup komoditas beras, jagung, kedele, daging sapi, daging ayam, telur,

minyak goreng, gula pasir, cabe merah yang disajikan dalam periode mingguan/bulanan/tahunan. Indikator ini mengukur stabil tidaknya harga pangan jika gejolak harga pangan di suatu wilayah kurang dari 10% dari kondisi normal, sedangkan pasokan pangan dinyatakan stabil jika penurunan pasokan pangan di suatu wilayah berkisar 5-40%.

Hasil Pemantauan Harga Pangan Pokok (Beras medium) selama 48 minggu selama tahun 2023 dengan koefisien keragaman *Coefisien Variabel* (CV) telah mencapai 8,39% dari target CV <10%. Angka ini menunjukkan bahwa fluktuasi harga pangan utama yaitu beras masih dalam kategori stabil. Harga Beras yang diambil yaitu beras medium bukan premium dikarenakan beras medium merupakan beras yang paling banyak dikonsumsi masyarakat. Angka ini menunjukkan bahwa fluktuasi harga pangan utama yaitu beras masih dalam kategori tidak stabil.

Pada umumnya fluktuasi/ lonjakan harga terjadi hanya bersifat sementara yaitu pada hari besar keagamaan dan nasional (HBKN) yaitu Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru. Kenaikan harga biasanya mulai terlihat ketika masyarakat menyambut datangnya bulan suci Ramadhan dan puncaknya menyambung Hari Raya Idul Fitri. Selain HBKN, fluktuasi harga yang terjadi tiap tahun karena adanya pergeseran nilai mata uang dimana harga beberapa komoditi pangan pokok tertentu dipengaruhi oleh perkembangan harga pasar internasional.

d. Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan

Indikator ini merupakan penyediaan informasi panganekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman, sesuai standard kecukupan energi dan protein perkapita per hari (PPH). Hal ini menyangkut peningkatan KAP (*Knowledge, Attitude, Practice*) konsumsi pangan masyarakat tentang pangan lokal, teknologi pengolahan pangan dan,

pemanfaatan lahan pekarangan dan penguatan kelembagaan. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi tahun 2023 adalah sebesar 93,1% yang berarti melebihi dari target direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar 85% sehingga persentase capaian kinerja tahun 2023 adalah 109,52%.

Untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, sekaligus melestarikan sumberdaya pangan dan pencapaian keberlanjutan ketahanan pangan dan kualitas lingkungan, pemilihan bahan makanan diharapkan dapat memenuhi tidak hanya kecukupan gizi (nutritional adequacy), tetapi sekaligus memenuhi keseimbangan gizi (nutritional balance) yang didukung cita rasa (palatability), kuantitas dan kemampuan daya beli (affordability). Untuk memilih beragam jenis pangan sesuai triguna makanan perlu disesuaikan dengan daya terima dan biaya yang tersedia untuk belanja pangan.

Berdasarkan data survey sosial ekonomi nasional tingkat kecukupan gizi konsumsi pangan penduduk Kota Prabumulih menunjukkan bahwa konsumsi energi per hari sebesar 1.954 kkal/kapita yang terdiri dari 9 (sembilan) kelompok pangan hal ini menunjukkan bahwa konsumsi energi penduduk Kota Prabumulih belum mencapai standar yang diharapkan, begitu juga dengan konsumsi protein penduduk Kota Prabumulih per hari sebesar 59,0 gram/kapita

Capaian skoring Angka PPH Konsumsi Pangan Kota Prabumulih masuk ke dalam kategori sangat baik dimana peningkatan skor diatas target capaian perjanjian kinerja. Keberhasilan ini diantaranya dipengaruhi oleh upaya edukasi ke masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman di Tahun 2023 yang cukup gencar dilaksanakan.

Secara ringkas, capaian indikator Utama Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih terlihat pada tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih

No	Indikator	Target IKK	Target Renstra			Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nilai SAKIP	Predikat	B	BB	A					
2	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	%	100	100	100					
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	94,1	94,3	94,6					
4	Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 23,4 Ton dalam 3 (Tiga) Tahun	Ton	7,8	7,8	7,8					
5	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	91,2	93,7	96,8					

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DKP

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang *significant* bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja utama dimana tingkat kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan sudah relatif baik, walaupun ada beberapa indikator kinerja yang pencapaiannya belum maksimal, sehingga capaian per 31 Desember 2023 sebesar 87,89% (Keuangan).

2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Capaian kinerja indikator pengadaan cadangan pangan tahun 2023 adalah sebesar 0 Ton dari target sebesar 13 Ton yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 0%.

Kuota Minimum Cadangan Pangan Pemerintah Kota mengacu kepada kepada Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 257/1869/DKPP/2018 yaitu 71,39 Ton untuk Kota Prabumulih. Jumlah Total beras Cadangan Pangan sampai dengan saat ini yaitu sebanyak 48,669 Ton dan telah disalurkan sebanyak 36,405 Ton. Total Cadangan pangan sampai dengan tahun 2023 yang tersimpan di gudang BULOG yaitu 12,264 Ton (20,39%) dari Total Kuota Minimum Kota Prabumulih.

Kegiatan pengadaan cadangan pangan tidak direalisasikan dikarenakan ada kegiatan penyaluran cadangan pangan yang terdapat pada APBD Perubahan Tahun 2023 serta proses pencairannya berada pada pertengahan bulan November dimana menurut surat dari BULOG Kanwil Sumsel Babel Nomor : B-160.06020.03.2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang izin prinsip penjualan beras untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) tidak dapat melakukan pengadaan sebelum dilakukan penyaluran beras yang telah disimpan/dititipkan di BULOG. Sementara, penyaluran beras tersebut dilaksanakan pada awal bulan Desember tahun 2023, sehingga waktu yang diperlukan untuk melakukan proses pengadaan cadangan pangan tidak mencukupi waktu dikarenakan telah mencapai batas waktu akhir anggaran tahun 2023.

Ketersediaan di Kota Prabumulih Tahun 2023 berdasarkan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) adalah sebesar **94,03** yang mana mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni 94,80. Perhitungan skor ini menggunakan aplikasi baru berdasarkan konsumsi SUSENAS dan produksi pertanian sedangkan data impor-ekspor sudah berdasarkan perhitungan aplikasi NBM Tahun 2023. Dengan menggunakan skor mutu ideal PPH ketersediaan sebesar 100 maka dapat dikatakan bahwa kualitas pangan yang tersedia di Prabumulih belum memenuhi kaidah gizi yang beragam dan seimbang yang ideal. Hal ini disebabkan kontribusi energi dari masing-masing kelompok pangan masih ada yang kurang, mendekati bahkan ada yang telah melebihi normal ideal PPH ketersediaan. Adapun kelompok pangan yang kontribusinya angka ideal PPH yang direkomendasikan yakni berasal dari kelompok pangan hewani, yaitu pangan hewani, minyak dan lemak dan dari kelompok pangan nabati yaitu sayur-sayuran, sedangkan kelompok bahan pangan yang masih dibawah angka ideal yang direkomendasikan terdiri dari kelompok buah/ biji berminyak, padi-padian,

kelompok umbi-umbian, kelompok gula, Kacang Kacangan dan kelompok lain-lain.

Termasuk ke dalam persoalan yang dihadapi DKP adalah belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan, berbasis peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA: *Food Security and vulnerability Atlas*). Hal ini dikarenakan pelaksanaan permetaan masih belum menjangkau keseluruhan Kecamatan di Kota Prabumulih dikarenakan keterbatasan anggaran.

Permasalahan berikutnya yaitu pengawasan standar mutu keamanan pangan segar di Kota Prabumulih belum optimal. Terlebih lokasi Kota Prabumulih yang strategis sehingga mobilitas barang masuk dan keluar cukup tinggi membutuhkan pengawasan yang lebih intens. Khususnya untuk pangan segar dirasakan sangat penting untuk peningkatan Pengawasan, registrasi, rekomendasi dan sertifikasi pangan segar di Tahun Anggaran selanjutnya (Tahun 2025).

Selanjutnya adalah Sistem informasi dan data ketahanan pangan belum optimal karena masalah keterbatasan SDM, sarana prasarana dan keterbatasan anggaran. Perlu peningkatan akses terhadap data dan informasi pangan kepada sektor publik melalui aplikasi berbasis online yang didukung oleh Sumber Daya Manusia serta sarana/prasarana pendukung lainnya seperti kendaraan dinas serta perangkat lunak.

3. Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap Capaian Program Nasional / Internasional

Setelah melaksanakan analisis kondisi lingkungan DKP saat ini, maka permasalahan dan hambatan yang ada perlu diminimalisir untuk memberikan dukungan penuh terhadap pencapaian Visi Misi Kepala Daerah yang fokus kepada

penurunan angka kemiskinan. Kondisi ideal yang ingin dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih adalah :

- a. Meningkatnya angka PPH Konsumsi Pangan mendekati angka ideal beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA)
- b. Kemudahan Akses Pangan, Stabilitas Harga Pangan/Stabilitas Harga Pangan Pokok,
- c. Meningkatnya Ketersediaan Pangan dan angka Neraca Bahan Makanan serta PPH ketersediaan mendekati angka ideal.
- d. Tersedianya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan (FSVA) untuk dasar bagi *mapping* kegiatan penanggulangan angka kemiskinan di Kota Prabumulih
- e. Terpenuhinya Kuota Cadangan Pangan Pemerintah untuk menangani kondisi darurat mengacu kepada kebutuhan Kota Prabumulih.
- f. Terlaksananya percepatan penganekaragaman pangan melalui peningkatan ketahanan pangan dan Obor Pangan Lestari
- g. Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat melalui, Penguatan dan Pembinaan Kelompok Pangan Olah, Pembinaan Kelompok masyarakat yang *concern* terhadap menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi untuk Siswa, dan Peningkatan SDM Kelompok Wanita Tani (KWT).
- h. Terjaminnya mutu dan keamanan pangan dengan pengawasan, registrasi dan sertifikasi pangan segar
- i. Promosi produk Pertanian/Perkebunan dan hasil *home industri* kelompok pangan olahan yang optimal
- j. Terciptanya dan Tereksposnya menu-menu baru yang beragam bergizi seimbang dan aman berdasarkan sumberdaya/kearifan lokal.

- k. Terjalannya kerjasama antar *stakeholder* terkait Ketahanan Pangan Masyarakat Kota Prabumulih.

4. Tantangan dan Faktor Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat daerah

a. Faktor Tantangan (*Treat*)

1. Mutu produk pangan segar dan pangan olahan masih relatif rendah, serta masih adanya penggunaan bahan kimia berbahaya pada pengelolaan pangan segar dan pangan olahan.
2. Masih belum optimalnya pola konsumsi masyarakat berdasarkan pola pangan harapan (PPH) yaitu ketergantungan terhadap beras dan terigu masih tinggi.
3. Harga Pangan Pokok dan pangan segar yang masih berfluktuasi menjelang HBKN dan atau perubahan cuaca ekstrim.
4. Masih belum terpenuhinya kuota Cadangan Pangan pemerintah Kota
5. Belum optimalnya pemetaan masyarakat rentan pangan dan tahan pangan di Kota Prabumulih
6. Belum terlaksana optimalnya diversifikasi/penganekaragaman konsumsi pangan terutama bagi pemenuhan gizi keluarga yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman.
7. Sistem informasi data ketahanan pangan belum optimal karena masalah SDM, sarana prasarana dan keterbatasan anggaran.

b. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1. Sistem dan birokrasi pemerintah Kota Prabumulih yang sudah tertata dengan baik.

2. Kepemimpinan kepala daerah yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan daerah yang partisipatif di Kota Prabumulih.
3. Sumber daya alam hayati dan sumber daya manusia tersedia.
4. Produksi pangan lokal relatif beragam dan cukup tinggi.
5. Ilmu pengetahuan dan teknologi mengenai pangan berkembang pesat.
6. Permintaan konsumen terhadap jenis dan kualitas pangan semakin beragam dan berimbang.
7. Peluang mulai berkembangnya diversifikasi pangan olahan masa kini dengan sistem pemasaran berbasis *online*.
8. Dukungan yang baik dari Tim Penggerak PKK sebagai ujung tombak edukasi dan promosi pola konsumsi pangan ideal
9. Posisi Strategis Kota Prabumulih yang memungkinkan akses yang terbuka bagi pasokan bahan pangan dan berimplikasi positif terhadap stabilnya harga pangan pokok di Kota Prabumulih

5. Formulasi Isu-isu Penting berupa Rekomendasi dan Catatan Strategis Prioritas Tahun yang direncanakan

Isu-isu penting dalam perumusan Program/Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan meliputi:

- a. Makin besarnya tantangan berkaitan dengan tinggi dan beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan ditindaklanjuti
- b. Makin tingginya jumlah penduduk akan mempengaruhi jumlah kebutuhan pangan (kualitas/kuantitas), beragam, bergizi seimbang dan Aman.

- c. Makin banyaknya produk pangan segar dan olahan yang berkembang di masyarakat yang belum memenuhi standar kesehatan.
- d. Makin meningkatnya teknologi informasi memerlukan SDM yang bisa mengikuti perkembangan teknologi informasi.

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factors*) merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan organisasi. Faktor penentu keberhasilan ini ditetapkan berdasarkan analisis faktor lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal. Dengan pendekatan SWOT sebagaimana dikemukakan diatas, analisis selanjutnya dilakukan untuk menentukan tingkat *urgensi* dan dampak potensial serta skala prioritas berbagai peluang dan ancaman yang mungkin terjadi. Saran dan Masukan Strategis untuk Tahun selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

1. Perlu adanya upaya stabilisasi harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) maupun harga sedang melambung tinggi melalui Gerakan Pangan Murah.
2. Perlu adanya peningkatan pengawasan mutu produk pangan segar dan olahan, serta registrasi/sertifikasi/rekomendasi produk pangan segar untuk menjamin keamanan dan mutu pangan segar di Kota Prabumulih mengingat mobilitas produk masuk dan keluar yang relatif tinggi.
3. Perlu adanya penguatan Cadangan Pangan Pemerintah untuk mengantisipasi kondisi darurat dan penanganan kerawanan pangan.
4. Pola konsumsi masyarakat yang belum memenuhi kualitas gizi yang baik, sehingga upaya pemberdayaan masyarakat, promosi, edukasi dan sosialisasi konsumsi pangan yang

B2SA perlu ditingkatkan lagi. Terlebih dengan adanya *mou* dengan Tim Penggerak PKK diharapkan angka PPH konsumsi masyarakat akan meningkat.

5. Lokasi pemetaan masyarakat rentan pangan dan tahan pangan di Kota Prabumulih perlu menjangkau ke seluruh lokasi sehingga upaya penanggulangan bagi masyarakat rentan pangandapat lebih baik lagi.
6. Sistem informasi dan data ketahanan pangan belum optimal karena masalah SDM, sarana prasarana dan keterbatasan anggaran. Perlu peningkatan akses terhadap data dan informasi pangan kepada sektor publik melalui aplikasi berbasis online yang didukung oleh sarana/prasarana seperti kendaraan dinas dan perangkat lunak.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Prabumulih

Perangkat Daerah : Dinas Ketahanan Pangan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam bidang Ketahanan Pangan yang mengacu pada kebijakan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Renstra Badan Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan jangka menengah, untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan, yang tercermin dari menurunnya jumlah penduduk rawan pangan, stabilnya harga dan pasokan pangan pokok, dan meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat.

Kebijakan nasional Ketahanan Pangan difokuskan pada aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Dari aspek ketersediaan yaitu: (a) peningkatan ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis potensi sumberdaya lokal; dan (b) memantapkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan. Dalam aspek keterjangkauan pangan, difokuskan pada: (a) stabilisasi pasokan dan harga pangan; serta (b) pengelolaan cadangan pangan. Sedangkan pada aspek pemanfaatan pangan, difokuskan pada: (a) percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal; dan ditunjang dengan (b) pengawasan mutu dan keamanan pangan segar. Kebijakan di tingkat Provinsi dan tingkat Kota Prabumulih diselaraskan dengan kebijakan Nasional.

3.1.2 Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi

Tahun 2025 adalah tahun pertama pencapaian target jangka

menengah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tahun 2024-2026 dan tahun akhir pencapaian target jangka menengah pada Rencana Strategis Renstra Badan Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 sasaran indikator kinerja ketahanan pangan tahun 2024 adalah :

1. Stok Cadangan Pangan Daerah (Ton) sebesar 12 Ton
2. Koefisien harga Pangan Strategis $\leq 15\%$
3. Pemantauan 11 komoditi pangan pokok yang didistribusikan antar waktu dan antar wilayah koefisien
4. Pencapaian skor pola pangan harapan konsumsi sebesar 94,8
5. Ketersediaan Energi sebesar 2.400 kkal/kap/hr dan ketersediaan Protein 63 gr/K.Kal/Kap/Hr
6. Persentase Kenaikan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang tersertifikasi/terregistrasi 30%
7. Jumlah kab/kota yang Memiliki lembaga sertifikasi pangan segar asal tumbuhan sebanyak 4 Kab/Kota
8. Jumlah rekomendasi, edukasi dan promosi keamanan pangan (lokasi) sebanyak 42 lokasi
9. Penurunan penduduk rawan pangan 1 persen per tahun

Untuk mencapai target Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat tahun 2024, beberapa hal prioritas untuk dilakukan yaitu:

1. Tetap melanjutkan upaya: pengentasan daerah rentan rawan pangan; peningkatan diversifikasi pangan; pengawasan keamanan dan mutu pangan segar; analisis, kajian dan perumusan kebijakan; serta mendukung pengentasan kemiskinan (program bekerja) dan Penanganan permasalahan gizi (stunting).
2. Melakukan transformasi kegiatan dalam rangka menyikapi Dinamika situasi ketahanan pangan dimana perlu dukungan untuk

- peningkatan produksi dan peningkatan nilai tambah komoditas.
3. Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, kita melakukan pemantauan harga baik di tingkat produsen maupun konsumen melalui kegiatan Panel Harga, Monitoring stok di penggilingan, serta penyelenggaraan bazaar/gelar pangan murah.
 4. Dalam rangka pemantapan cadangan beras nasional, DKPP bekerja sama dan Bulog.
 5. Dalam upaya mendukung peningkatan daya saing komoditas pertanian segar asal tumbuhan, maka upaya penguatan Kapasitas Kelembangan OKKP perlu dilakukan.

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih mengacu kepada kebijakan Nasional dan Provinsi kecuali untuk situasi khusus yang disebabkan sumberdaya luasan produksi pangan/padi yang tidak memadai dan bukan wilayah sentra pertanian tanaman pangan.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih

Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih sebagai salah satu unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Daerah Kota Prabumulih dimaksudkan untuk peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Ketahanan Pangan untuk mendukung Visi Kota Prabumulih “Terwujudnya Kota Prabumulih sebagai Kota Prima dan Berkualitas” yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan memberikan arahan bagi Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih sehingga tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih adalah :

- A. Menjabarkan strategi Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih satu tahun kedepan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang ketahanan pangan yang selaras dengan Kebijakan nasional dan Provinsi dengan mempertimbangkan situasi, kondisi serta potensi daerah.
- B. Sebagai pedoman dan acuan kerja bagi Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih serta pihak terkait dalam upaya pembangunan di bidang ketahanan pangan Kota Prabumulih.
- C. Menjadi pedoman dan acuan untuk penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2024-2026
Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN TAHUN KE		
							1	2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Predikat	BB	B (60-70)	BB (70-75)	BB (76-80)
				Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	%	100	100	100	100
2.	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup	Skor Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	94,8	94,1	94,3	94,6
			Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 23,4 Ton dalam 3 (Tiga) Tahun	Ton	32,44	7,8	7,8	7,8
			Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Skor Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	85,2	91,2	93,7	96,8

3.3 Program dan Kegiatan

Mengacu kepada Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan untuk Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
2	09	03	2.01	0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
2	09	03	2.01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
2	09	03	2.01	0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota
2	09	03	2.01	0011	Pemantauan Stok Pangan
2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota
2	09	03	2.01	0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota
2	09	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis
2	09	03	2.01	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan
2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
2	09	03	2.02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
2	09	03	2.02	0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
2	09	03	2.02	0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR
2	09	03	2.02	0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota
2	09	03	2.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
2	09	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
2	09	03	3.02		Pengelolaan dan Keseimbangan CadanganPangan Kabupaten/Kota
2	09	03	2.04	0003	Penyusunan kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota melalui Peraturan Kabupaten/Kota
2	09	03	3.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untukPangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
2	09	03	3,03	0002	Penyusunan Kebijakan mengenai penentuan harga Pangan Lokal Minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah, dan/atau Peraturan Bupati/Walikota
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kab/Kota
2	09	04	2.02	0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi
2	09	04	2.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kab/Kota
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Segar Daerah Kabupaten/Kota

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR
2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	2.01	0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
X	XX	1	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X	XX	1	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
X	XX	1	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
X	XX	1	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
X	XX	1	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
X	XX	1	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X	XX	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
X	XX	1	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
X	XX	1	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
X	XX	1	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
X	XX	1	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
X	XX	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
X	XX	1	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
X	XX	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
X	XX	1	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
X	XX	1	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
X	XX	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
X	XX	1	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
X	XX	1	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
X	XX	1	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
X	XX	1	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
X	XX	1	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material
X	XX	1	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR
X	XX	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
X	XX	1	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
X	XX	1	2.07	0005	Pengadaan Mebel
X	XX	1	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
X	XX	1	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
X	XX	1	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
X	XX	1	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
X	XX	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
X	XX	1	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
X	XX	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
X	XX	1	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
X	XX	1	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Dari uraian tersebut diatas secara rinci Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2025 yang secara skematis dapat diuraikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra 2026	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab				
				Target Kinerja Tahun 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Nasional	Daerah								
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN													
2	09	01															
2	09	01	2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										3.891.065.270		
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										14.000.000		
2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENJA)	3 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	1 Dokumen	1.500.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	1 Dokumen	1.500.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	1 Dokumen	1.500.000	Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra 2026	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab				
				Target Kinerja Tahun 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Nasional	Daerah								
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	1 Dokumen	1.500.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	1 Dokumen	8.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											3.147.865.270	
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Pegawai	54 Orang/Bulan	23 Orang/Bulan	2.850.526.780	Dinas Ketahanan Pangan	DAU			Pegawai Dinas Ketahanan Pangan	54 Orang/Bulan	3.110.065.270	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	34.800.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	1 Dokumen	34.800.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	1 Dokumen	1.500.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	1 Dokumen	1.500.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah											18.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra 2026	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
				Target Kinerja Tahun 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.09.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	1 Laporan	18.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	1 Laporan	18.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				45.000.000							45.000.000	
2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket	32 Paket	25.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	30 Paket	25.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 orang	2 orang	20.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	15 orang	20.000.000	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				436.000.000							386.000.000	
2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	5.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	1 Paket	5.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	10.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	1 Paket	10.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	3 Paket	1 Paket	10.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	1 Paket	10.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Materail	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	11.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	1 Paket	11.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	2 Laporan	400.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	2 Laporan	350.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				950.000.000							100.000.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra 2026	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
				Target Kinerja Tahun 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.09.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 unit	600.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	-	-	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	7 Unit	100.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	4 Unit	50.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	6 Unit	100.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	3 Unit	50.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	150.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	-	-	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.200.000							3.200.000	
2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Materai)	3 Laporan	1 Laporan	3.200.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	1 Laporan	3.200.000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				177.000.000							177.000.000	
2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	57 Unit	19 unit	170.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	19 unit	170.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	5 Unit	7.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Dinas Ketahanan Pangan	5 Unit	7.000.000	Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra 2026	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab				
				Target Kinerja Tahun 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Nasional	Daerah								
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		1.820.000.000						2.414.000.000				
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		830.000.000						1.080.000.000				
2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	3 Laporan	1 Laporan	50.000.000	Kecamatan Kota Prabumulih	PAD			KWT	1 Laporan	50.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	3 Laporan	1 Laporan	10.000.000	Kecamatan Kota Prabumulih	PAD			Masyarakat kota prabumulih (Desa Pangkul, Desa Muara sungai, Kelurahan Sungai Medang)	1 Laporan	150.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	725 Keluarga	100 Keluarga	150.000.000	Kota Prabumulih	PAD			KWT	100 Keluarga	150.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	2.01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	3 Laporan	1 Laporan	300.000.000	Pasar Kota Prabumulih	PAD			Pedagang grosir dan eceran kota prabumulih	1 Laporan	350.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	2.01	0009	Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	1 Laporan	100.000.000	Kota Prabumulih	PAD			Masyarakat Kota Prabumulih	1 Laporan	200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra 2026	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab
				Target Kinerja Tahun 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Nasional	Daerah				
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	3 Unit	1 Unit	25.000.000	Kota Prabumulih	PAD			Masyarakat Kota Prabumulih	1 Unit	25.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	3 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	Pasar Kota Prabumulih	PAD			Pedagang grosir dan eceran kota prabumulih	1 Dokumen	30.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	3 Laporan	1 Laporan	65.000.000	Pasar Kota Prabumulih	PAD			Pedagang grosir dan eceran kota prabumulih	1 Laporan	65.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	3 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	Pasar Kota Prabumulih	PAD			Pedagang grosir dan eceran kota prabumulih	1 Dokumen	30.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	3 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	Pasar Kota Prabumulih	PAD			Pedagang grosir dan eceran kota prabumulih	1 Dokumen	30.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				350.000.000							300.000.000	
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	23,4 Ton	20 ton	300.000.000	BULOG	PAD			Masyarakat Kota Prabumulih	15 ton	250.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	23,484	10 ton	20.000.000	BULOG	PAD			Masyarakat Kota Prabumulih	10 ton	20.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	36 Ton	10 ton	30.000.000	BULOG	PAD			Masyarakat Kota Prabumulih	10 ton	30.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.03.3.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				250.000.000							-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra 2026	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab				
				Target Kinerja Tahun 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Nasional	Daerah								
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
2	09	03	3.02	0005	Penyusunan kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kab/Kota melalui Peraturan Kab/Kota	Jumlah Dokumen kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kab/kota melalui Peraturan Kab/Kota yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	Dinas Ketahanan Pangan	PAD			Masyarakat Kota Prabumulih	-	-	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				390.000.000							1.034.000.000	
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita Per tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	3 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	Kecamatan Kota Prabumulih	PAD			6 Kecamatan	1 Dokumen	50.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokall	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	24 Laporan	2 Laporan	340.000.000	Kecamatan Kota Prabumulih	PAD			Kelompok Wanita Tani	1 Laporan	984.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				295.000.000							25.000.000	
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				45.000.000							25.000.000	
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan	3 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000	Kecamatan Kota Prabumulih	PAD			Masyarakat Kota Pabumulih	1 Dokumen	25.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kab/Kota				250.000.000							350.000.000	
2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	Masyarakat Kota Pabumulih	PAD			Masyarakat Kota Pabumulih	1 Dokumen	350.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				75.000.000							90.000.000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra 2026	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok sasaran	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026		PD Penanggung Jawab	
								Target Kinerja Tahun 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
												Nasional					Daerah
1					2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000							90.000.000	
2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	Kota Prabumulih	PAD			Pedagang dan Petani Kota Prabumulih	1 Dokumen	30.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	3 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	Kota Prabumulih	PAD			Pedagang dan Petani Kota Prabumulih	1 Dokumen	30.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	3 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	Kota Prabumulih	PAD			Pedagang dan Petani Kota Prabumulih	1 Dokumen	30.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
GRAND TOTAL									6.721.526.780							6.420.065.270	

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2025 merupakan bagian yang tak terpisahkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Prabumulih Tahun 2005-2025, serta merupakan kesinambungan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Prabumulih. Adapun Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan yaitu Program dan Kegiatan Tahun 2024 mengacu ke Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah meliputi Program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini meliputi 4 Kegiatan yaitu

- a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
- b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
- c. Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
- d. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

2. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini meliputi 2 (dua) Kegiatan yaitu

- a. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
- b. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini meliputi 1 (satu) Kegiatan yaitu Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program ini meliputi 8 Kegiatan yaitu:

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2025 akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada tahun 2025 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Prabumulih 2024-2026. Sedangkan Sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih. Apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, maka Perangkat daerah membuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Prabumulih Tahun 2024-2026

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih adalah dokumen perencanaan bidang ketahanan pangan untuk periode 3 (tiga) tahun. Renja ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang ketahanan pangan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota Prabumulih yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam KInerja Penyelenggaraan Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Prabumulih Tahun 2024-2026. Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renja ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kota Prabumulih.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Prabumulih Tahun 2024-2026 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Prabumulih Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) Kota Prabumulih dengan didukung oleh seluruh *stakeholders* termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Walikota, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Prabumulih Tahun 2024-2026 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekertaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Prabumulih Tahun 2024-2026
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) Kota Prabumulih berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan pokok dan unggulan pembangunan

sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Prabumulih Tahun 2024-2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kota Prabumulih untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaan secara tahun jamak (multy year);

5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Prabumulih Tahun 2024-2026 , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Prabumulih berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Prabumulih, serta membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Pengawasan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), serta evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD);
6. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Prabumulih agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;
7. Untuk merealisasikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang penuh tantangan dan dinamika pembangunan, maka digunakan 5 (lima) prinsip utama yaitu :
 - a. Prinsip perencanaan kegiatan mengacu kepada prinsip perencanaan yang cerdas (SMART Planning), yaitu kegiatan terpilih harus diyakini argumentative dan memiliki kekhususan (Spesific), terukur (Measurable), ketercapaian (Achievable), ketersediaan sumber daya (Resources Availability), dan waktu (Time). Pemilihan kegiatan melalui arah fokus pembangunan yang merujuk pada rencana capaian kinerja berdasarkan bidang pada setiap misi pembangunan, merupakan sinergitas lintas PD, antar tingkatan pemerintahan dan dunia usaha maupun masyarakat,

terdiri atas : peningkatan kualitas pendidikan; peningkatan kualitas kesehatan; peningkatan daya beli masyarakat; kemandirian pangan; peningkatan kinerja aparatur; pengembangan infrastruktur wilayah; kemandirian energy dan kecukupan air baku; penanganan pengelolaan bencana; dan pembangunan perdesaan.

- b. Prinsip administrasi perencanaan, yaitu menggunakan *Shewhart Cycle* yang dikenal dengan siklus PDCA dengan tahapan : Rencana (Plan), Kerjakan apa yang telah direncanakan (Do), Periksa atau monitor pelaksanaan (Check), dan Aksi tindak lanjut (Action). Untuk memudahkan RPD Kota Prabumulih Tahun 2024-2026 koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan, maka digunakan pembagian peran PD untuk melaksanakan RPJM Daerah berdasarkan misi pembangunan, dengan membagi peran PD.
 - c. Prinsip pelaksanaan program dan kegiatan menggunakan prinsip akuntabilitas (accountability) yang memiliki 3 (tiga) aspek, yaitu :
 - 1) Taat dan sesuai aturan (*Compliance with Regulation*)
 - 2) Sesuai dengan norma profesionalisme (*Adherence with Norm Professionalism*)
 - 3) Berorientasi pada hasil yang berkualitas (*Quality Result Driven*)
 - d. Prinsip dukungan kebijakan keuangan mengikuti kebutuhan program terpilih (*Money Follow Program Selected Policy*)
 - e. Prinsip pengendalian untuk sukses pelaksanaan kegiatan dengan memerankan :
 - 1) *Desk monitoring* dan evaluasi implementasi program untuk pengendalian kualitas implementasi kegiatan dan ketaatan waktu serta output;
 - 2) *Desk akuntabilitas* untuk pendampingan dan pengendalian ketaatan terhadap aturan dan disiplin anggaran.
8. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 belum dapat dilakukan karena tahun 2024 adalah tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, namun evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi RPJMD Tahun 2018-2023 .

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih. Karena itu, Renja menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2024.

Program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih merupakan cara untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang ketahanan pangan dan atau target kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih.

Pelaksanaan dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan RKA Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun sebagai Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih, Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja lebih baik dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih.